

# Kutipan: Menjaga Kemajuan Hubungan A.S.-Indonesia

Joshua Kurlantzick

Council Special Report (Laporan Khusus Dewan) No. 81, Februari 2018

## *PENDAHULUAN*

Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia sudah lama kurang memanfaatkan potensinya. Indonesia dapat menjadi mitra keamanan penting dan lokasi yang lebih besar untuk investasi dan perdagangan A.S. dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2000-an dan awal tahun 2010 tampaknya akan mengantar kerja sama bilateral yang lebih besar, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, tetapi Washington dan Jakarta terlalu melebih-lebihkan seberapa cepatnya hubungan itu akan berkembang. Meskipun berkembangnya hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Indonesia, angkatan bersenjata A.S. memiliki hubungan yang kurang komprehensif dengan militer Indonesia dibandingkan dengan hubungan yang mereka jalin dengan banyak militer lainnya di Asia Tenggara, dan hubungan ekonomi hanya menghasilkan kemajuan yang terbatas, meskipun investasi A.S. meningkat.

Kedua belah pihak sekarang menghadapi hambatan signifikan untuk hubungan yang lebih dekat yang akan mencakup tidak hanya hubungan strategis tetapi juga hubungan ekonomi yang lebih dalam dan kerja sama dalam mempromosikan hak dan demokrasi. Mengingat keprihatinan pemerintahan Donald J. Trump atas ketidakseimbangan perdagangan dengan eksportir utama, Gedung Putih mungkin berfokus pada apa yang dianggapnya sebagai hubungan perdagangan yang tidak adil dengan Indonesia, yang akan memicu amarah rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintahan Trump juga kurang memberikan penekanan pada demokrasi dan hak asasi manusia sebagai komponen inti dari kebijakan luar negeri A.S.<sup>2</sup> Pengganti Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, kurang mendukung upaya promosi demokrasi daerah dibandingkan dengan pendahulunya. Mengingat hambatan-hambatan ini, Amerika Serikat dan Indonesia kecil kemungkinannya untuk mengembangkan jenis hubungan bilateral komprehensif yang sering kali dibayangkan—tetapi tidak pernah tercapai dengan sepenuhnya—pada tahun 2000-an dan awal tahun 2010-an.

Alih-alih berupaya mencapai sasaran yang kecil kemungkinan tercapai, kedua negara seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih transaksional. Hubungan tersebut seharusnya berfokus pada tiga tantangan keamanan bersama yang jelas: Keagresifan Tiongkok yang semakin meningkat di Laut Cina Selatan, yang menentang supremasi A.S. dan berpotensi menghambat akses Indonesia ke perairan Laut Cina Selatan; ekspansi militan yang terkait dengan Negara Islam memproklamkan diri ke Asia Tenggara, yang mengancam Indonesia dan menghentikan ekspansi itu merupakan prioritas Gedung Putih; dan pembajakan di Asia Tenggara, yang mengganggu stabilitas Indonesia dan membiayai kelompok militan. Pendekatan praktis dan berbasis keamanan seperti itu seharusnya menarik perhatian presiden kedua negara.

Sementara itu, Amerika Serikat dan Indonesia seharusnya mengupayakan perbaikan hubungan ekonomi yang sederhana namun dapat dicapai dalam beberapa tahun mendatang, sebelum pemilihan presiden A.S.

dan Indonesia berikutnya, pada tahun 2020 dan 2019. Meskipun mencapai peningkatan sederhana mungkin tampak seperti kemajuan yang terbatas, hal itu jauh lebih baik daripada hasil potensial lain dari hubungan ekonomi itu—meningkatnya hambatan perdagangan bilateral dan nasionalisme ekonomi yang agresif di kedua sisi.

## REKOMENDASI

Mengingat bahwa Presiden Trump dan Jokowi kurang memberikan penekanan pada kebijakan luar negeri berbasis nilai dan bahwa nasionalisme ekonomi di kedua negara telah menghambat hubungan ekonomi bilateral, kecil kemungkinannya bagi Amerika Serikat dan Indonesia akan bekerja sama dalam mempromosikan demokrasi di Asia Tenggara atau meningkatkan hubungan perdagangan mereka secara dramatis dalam jangka pendek, meskipun investasi A.S. di Indonesia mungkin akan terus meningkat, mengingat pasar konsumen muda dan berkembang di negara itu. Para pemimpin kedua negara seharusnya berfokus pada kerja sama keamanan yang menjadi kepentingan bersama yang signifikan bagi Amerika Serikat dan Indonesia. Mereka juga seharusnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hubungan ekonomi itu tidak memburuk.

Kepentingan keamanan bersama ini akan menjadi semakin kuat selama masa pemerintahan Trump. Karena Negara Islam telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Timur Tengah, beberapa pejuang asingnya bisa melarikan diri, membawa pulang pandangan mereka ke tanah air mereka, atau mencari pangkalan baru di Asia Tenggara. Akibatnya, ancaman militansi Islam dapat meningkat di seluruh Asia Tenggara selama beberapa tahun mendatang. Selama waktu itu, perselisihan mengenai militerisasi cepat Laut Cina Selatan kemungkinan akan tumbuh, ketika Washington dan Beijing telah mengisyaratkan peningkatan keagresifan angkatan laut mereka. Dan meskipun Jokowi telah menyatakan fokusnya pada pembajakan dan kegiatan maritim ilegal lainnya, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya masih berjuang untuk mengatasi ancaman keamanan nontradisional ini.

Kerja sama di bidang kepentingan keamanan bersama ini dapat memajukan hubungan strategis bilateral secara substansial. Untuk meningkatkan hubungan strategis, Washington dan Jakarta—dibantu oleh Australia dan kekuatan regional lainnya—seharusnya mengambil langkah-langkah berikut ini.

### Meningkatkan Kerja Sama Bilateral pada Tantangan Laut Cina Selatan

- **Amerika Serikat seharusnya meningkatkan pendanaan untuk program Pelatihan Militer dan Pendidikan Internasional bagi tentara Indonesia setidaknya 50 persen lebih banyak dari jumlah saat ini sekitar \$2,4 juta per tahun.** Langkah ini akan membantu memantapkan sentimen pro-A.S. di kalangan perwira muda dan meningkatkan profesionalisme militer Indonesia, yang akan memfasilitasi kerja sama keamanan A.S.-Indonesia. Perwira muda di Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang telah mendapat manfaat dari interaksi baru dengan militer A.S. sejak tahun 2000-an, secara bertahap menjadi bersedia untuk mempertimbangkan kembali kepatuhan tradisional Jakarta terhadap politik yang tidak berpihak dan kehadiran keamanan maritim pasif.
- **Amerika Serikat seharusnya mendorong Indonesia untuk melakukan operasi kebebasan navigasi dengan Australia di Laut Cina Selatan.** Indonesia dan Australia kemungkinan tidak ingin menantang Beijing secara langsung dengan menyelenggarakan patroli kebebasan navigasi (freedom of navigation operations [FONOPs]) bersama dengan kapal A.S., yang akan lebih memicu amarah Tiongkok. Namun

sebelum kunjungan ke Australia pada Februari 2017, Jokowi mengumumkan secara terbuka gagasan peluncuran patroli bersama di Laut Cina Selatan dengan pasukan Australia. Sejauh ini, Australia secara terbuka menolak gagasan itu. Indonesia dan Australia seharusnya memulai FONOP bersama-sama dalam zona kelautan dua belas mil di pulau-pulau reklamasi Tiongkok di Laut Cina Selatan.

- **Amerika Serikat seharusnya menawarkan untuk mengadakan latihan bersama dengan Indonesia di perairan di dekat Kepulauan Natuna.** Amerika Serikat telah melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan dengan mitra regional lainnya sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga Australia, India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara akan membela kebebasan navigasi. Menggelar latihan bersama A.S.-Indonesia di dekat Kepulauan Natuna akan memperkuat kemitraan keamanan A.S.-Indonesia dan menunjukkan kepada Tiongkok bahwa Indonesia tidak akan lagi mengadopsi pendekatan pasif terhadap masalah Laut Cina Selatan.
- **Amerika Serikat seharusnya mendorong Indonesia untuk mencapai sasarannya untuk meningkatkan belanja pertahanan sementara itu juga mendorong Jokowi untuk memundurkan angkatan laut dan udara Indonesia.** Washington seharusnya meningkatkan penjualan kapal maritim yang lebih besar, pesawat terbang baru, dan kapal penjaga pantai cepat ke Jakarta, untuk membantu Jakarta mengembangkan pasukan maritim yang mampu melindungi wilayah perairan Indonesia dan berpartisipasi dalam tindakan yang lebih luas di Laut Cina Selatan. Modernisasi pasukan Indonesia seharusnya berfokus pada angkatan laut, penjaga pantai, dan angkatan udara, karena Indonesia tidak memiliki ancaman berbasis darat yang nyata.
- **Amerika Serikat seharusnya mendorong Indonesia untuk memimpin dalam memfasilitasi posisi bersama ASEAN pada pedoman perilaku untuk Laut Cina Selatan.**<sup>3</sup> Para pejabat A.S. dan Asia Tenggara seharusnya mendorong Jokowi dan pemimpin utama Indonesia lainnya untuk menyoroti keputusan Den Haag 2016 atas klaim teritorial di Laut Cina Selatan sebagai titik awal untuk negosiasi serius terkait pedoman perilaku itu. Amerika Serikat juga seharusnya mendorong Jokowi untuk menggunakan pertemuan-pertemuan ASEAN pada tahun 2018 dan 2019 untuk memperantarai posisi umum ASEAN terkait pedoman perilaku itu.
- **Amerika Serikat dan Indonesia seharusnya mengadakan dialog strategis tingkat menteri dan memfokuskannya pada Laut Cina Selatan.** Pemerintahan Trump seharusnya mengadakan dialog yang belum terlaksana tersebut. Kedua belah pihak seharusnya menggunakan dialog tersebut untuk mengumumkan langkah-langkah menuju kerja sama bilateral, seperti peningkatan dukungan A.S. untuk modernisasi militer Indonesia dan rencana untuk mengadakan latihan maritim bersama A.S.-Indonesia di dekat Kepulauan Natuna. Dialog strategis itu juga seharusnya mencakup diskusi tentang kelompok-kelompok yang terkait dengan Negara Islam di Asia Tenggara, pembajakan dan kejahatan transnasional, dan hubungan ekonomi bilateral.

#### **Memperkuat Strategi Bilateral untuk Memerangi Negara Islam**

- **Untuk memerangi ancaman serangan yang terkait dengan Negara Islam, Amerika Serikat seharusnya membantu Indonesia memberlakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk menemukan, melacak, dan memeriksa para pejuang yang kembali ke tanah air dari wilayah yang dikuasai Negara Islam di Timur Tengah dan mengidentifikasi lebih banyak militan Indonesia yang**

terkait dengan Negara Islam. Negara-negara tetangga Indonesia memiliki catatan beragam dalam melacak para pejuang yang kembali dari Negara Islam. Sampai saat ini, pemerintahan Jokowi juga kurang ketat dalam melacak para pejuang yang kembali ke tanah air. Akan tetapi, pemerintah Indonesia dapat menetapkan program formal yang diawasi oleh kepolisian (bukan militer) untuk memantau para pejuang yang kembali ke tanah air dari wilayah Negara Islam untuk jangka waktu setidaknya lima tahun dan membantu mereka diintegrasikan kembali secara damai ke dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.<sup>4</sup> Pemerintah A.S. dapat memberikan dukungan keuangan untuk program reintegrasi ini. Meskipun demikian, Departemen Keuangan A.S. seharusnya terus mengidentifikasi militan Indonesia sebagai teroris dan menjatuhkan sanksi pada mereka dengan menempatkan mereka pada Daftar Orang yang Ditetapkan secara Khusus (Specially Designated Nationals) dan Daftar Orang yang Diblokir (Blocked Persons). Banyak lagi pejuang yang bisa datang ke Asia Tenggara sekarang setelah Raqqa jatuh ke tangan Sekutu.<sup>5</sup>

- **Amerika Serikat seharusnya menciptakan pasukan petugas polisi kecil dan permanen untuk memimpin pelatihan bagi polisi asing.** Amerika Serikat sudah terlibat erat dengan memberikan pelatihan kepada kepolisian Indonesia, tetapi upaya ini terhambat karena tidak memiliki unit permanen, yang berada di dalam Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman, atau Departemen Luar Negeri, untuk melatih pasukan kepolisian setempat. Unit semacam itu—pasukan kepolisian yang dapat dikerahkan ke berbagai negara untuk pelatihan—akan membawa pengalaman dan keterampilan yang lebih besar pada program pelatihan, termasuk program yang ditujukan untuk memberantas jaringan teroris.<sup>6</sup>
- **Amerika Serikat seharusnya mendesak Indonesia untuk bergabung dengan Koalisi Global yang dipimpin A.S. untuk Mengalahkan ISIS, yang akan memberikan akses lebih besar terhadap intelijen bersama.** Mengingat meningkatnya ancaman militan yang terkait dengan Negara Islam di Asia Tenggara dan ancaman Mindanao yang menjadi pusat rekrutmen, pemerintahan Jokowi dan Gedung Putih seharusnya mengambil tindakan lebih kuat untuk memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh para pejuang Negara Islam yang kembali ke tanah air. Indonesia belum bergabung dengan koalisi pimpinan A.S. Koalisi ini juga sering gagal untuk membagikan secara efektif intelijen tentang para pejuang yang kembali ke tanah air dari Irak dan Suriah kepada negara-negara lain di kawasan tersebut.<sup>7</sup> Untuk menunjukkan bahwa Indonesia mempertimbangkan ancaman Negara Islam secara serius, Jakarta seharusnya bergabung dengan koalisi itu.
- **Indonesia, Malaysia, dan Filipina seharusnya mengadakan patroli angkatan laut atau penjaga pantai bersama di Laut Sulu-Celebes setidaknya setiap bulan; Amerika Serikat seharusnya menawarkan untuk bergabung dengan patroli ini untuk memburu kaum militan.** Perairan ini sangat penting bagi perompak dan militan dan dikenal secara historis terkait kejahatan transnasional dan pelanggaran hukum; tanpa patroli laut, kelompok-kelompok yang terkait dengan Negara Islam akan dapat dengan mudah memindahkan orang-orang melalui Asia Tenggara. Indonesia setuju pada Mei 2016 untuk memulai patroli terkoordinasi pada perairan perbatasan di Laut Sulu-Celebes, bersama dengan pasukan dari Malaysia dan Filipina.<sup>8</sup> Akan tetapi, patroli itu tidak teratur, dan ruang lingkungannya masih belum jelas.<sup>9</sup> Tiga negara Asia Tenggara itu, bersama dengan Amerika Serikat, seharusnya melakukan patroli bulanan, dan menteri pertahanan mereka seharusnya berdiskusi setidaknya dua bulan sekali untuk menilai hasil patroli itu.

- Pemerintahan Jokowi seharusnya menggunakan kursi kepresidenan Indonesia untuk menggalang dukungan publik melawan militan yang menggunakan kekerasan dan tanpa kekerasan. Langkah-langkah retorik yang lebih keras terhadap kelompok radikal yang terkait dengan Negara Islam dapat membuat marah kelompok-kelompok Islam Indonesia seperti kelompok yang melakukan unjuk rasa menentang Ahok. Tetapi lebih dari 90 persen rakyat Indonesia memiliki citra buruk terhadap Negara Islam, demikian menurut jajak pendapat baru-baru ini.<sup>10</sup> Yudhoyono menggunakan ketidakpopuleran kelompok militan yang ganas dan popularitas tradisi dan demokrasi moderat di Indonesia untuk menggalang dukungan publik guna memerangi kaum radikal yang ganas. Jokowi, yang sudah lebih nyaman di kalangan pemilih religius daripada pendahulunya, bisa juga menggunakan platformnya untuk memenangkan dukungan publik dalam memerangi jaringan militan dan menjunjung tinggi sifat sekuler dan demokratis dari lembaga-lembaga Indonesia. Deklarasi terbaru Jokowi tentang dukungan terhadap Indonesia yang pluralistik—ketika pemerintah akan melindungi warga dari kekerasan dan mencegah militan menumbangkan demokrasi—memberikan awal yang sangat baik untuk menggunakan kekuasaan jabatannya.
- Jokowi seharusnya meyakinkan pemilih religius bahwa dia tidak bermaksud mengganggu partisipasi politik yang damai. Jokowi dengan demikian akan menampilkan dirinya bersikap keras pada radikalisme sambil mempertahankan citranya sebagai pendukung hak-hak beragama dan teman dari organisasi Muslim arus utama.

#### **Bekerja Sama untuk Memerangi Pembajakan**

- Amerika Serikat seharusnya menawarkan untuk bergabung secara teratur dengan patroli Laut Sulu-Celebes untuk memberikan pelatihan dan dukungan bagi upaya anti-pembajakan. Pada Juli 2017, Angkatan Laut A.S. mengumumkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan patroli bersama terkoordinasi di Laut Sulu dengan pasukan Filipina.<sup>11</sup> Bergabung secara teratur dengan patroli multilateral akan memberi Amerika Serikat porsi yang lebih besar dalam memantau kelompok militan di Laut Sulu, tetapi kehadiran A.S. yang lebih besar juga bisa berfungsi sebagai penghalang bagi perompak dan kelompok kejahatan terorganisasi lainnya yang secara historis berkembang di perairan Sulu. Amerika Serikat juga bisa bergabung dengan patroli udara yang sangat penting untuk mengidentifikasi kapal bajak laut.
- Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Amerika Serikat seharusnya menggunakan patroli Laut Sulu-Celebes untuk memfasilitasi pengejaran darurat para perompak dan militan ke wilayah perairan berbagai negara yang berbeda. Tiga negara Asia Tenggara, dengan bantuan Amerika Serikat, seharusnya mempermudah kapal dari satu negara melacak bajak laut (atau kelompok hibrida bajak laut/militer) dalam “pengejaran darurat” ke dalam perairan teritorial negara lain. Meskipun negara-negara tersebut secara teknis telah setuju untuk mengizinkan pengejaran darurat, tindakan itu jarang terjadi. Dengan dukungan A.S., akan lebih mudah bagi negara-negara Asia Tenggara untuk melaksanakan dan melakukan upaya pengejaran darurat.

#### **Mengambil Langkah-Langkah Terbatas untuk Mempromosikan Hubungan Ekonomi Bilateral**

Hubungan keamanan antara Jakarta dan Washington memiliki potensi besar dan bisa menjadi lebih tangguh dalam tiga tahun mendatang. Hal yang sama mungkin tidak dapat dikatakan tentang hubungan ekonomi bilateral, ketika nasionalisme ekonomi berkembang baik di Amerika Serikat maupun Indonesia. Oleh karena

itu, para pemimpin opini di Jakarta dan Washington seharusnya mencoba untuk menghentikan kemerosotan lebih lanjut dari hubungan ekonomi bilateral itu, seperti melalui pembatasan baru pada investasi di Indonesia atau tarif A.S. untuk ekspor Indonesia.

Sekadar mencegah hubungan ekonomi menjadi lebih buruk adalah sasaran yang layak dicapai, dan dapat membantu investasi A.S. di Indonesia terus tumbuh. Gedung Putih telah menempatkan Indonesia pada daftar awal negara-negara yang diyakini mungkin menyalahgunakan aturan perdagangan sehingga membingungkan para pejabat di Jakarta.<sup>12</sup> Namun selama kunjungan ke Indonesia pada April 2017, Wakil Presiden Mike Pence melunakkan pernyataannya terhadap Jakarta dan meningkatkan harapan akan kemajuan yang signifikan dalam perdagangan bilateral.<sup>13</sup>

Pemerintahan Trump telah berjanji untuk terus memperluas pasar A.S. melalui liberalisasi perdagangan bilateral dan dapat mencoba untuk menandatangani kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan Indonesia. Tapi ini adalah tujuan yang terlalu ambisius ketika Gedung Putih sedang mempertimbangkan mengubah atau mengakhiri kesepakatan perdagangan dengan Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan dan ketika tidak ada negara Asia menyambut gagasan kesepakatan bilateral baru selama kunjungan Trump ke Asia pada November 2017.

Sekadar mempertahankan momentum sederhana dalam hubungan ekonomi A.S.-Indonesia merupakan pilihan yang paling layak sekarang. Ini dapat diselesaikan dalam beberapa langkah.

- **Amerika Serikat dan Indonesia seharusnya menegosiasikan perjanjian investasi bilateral untuk mempertahankan hubungan ekonomi.** Ini adalah langkah yang jauh lebih sederhana daripada kesepakatan perdagangan bilateral, namun akan meningkatkan investasi A.S. di Indonesia setelah kesepakatan itu dituntaskan. Investasi yang lebih besar mungkin memberi perusahaan A.S. pengaruh lebih besar terhadap pemerintahan Jokowi. Peningkatan investasi juga dapat membantu mengurangi nasionalisme ekonomi yang populer di Indonesia, jika Jokowi juga mencanangkan investasi baru dan menghubungkannya dengan pertumbuhan, peningkatan infrastruktur, dan lapangan pekerjaan.
- **Kedua pihak seharusnya memasukkan Departemen Perdagangan A.S. dalam dialog strategis dan menggunakan diskusi untuk menyuarakan keprihatinan tentang neraca perdagangan bilateral.** Dialog itu sendiri dapat membantu mencegah kemunduran dalam hubungan ekonomi.
- **Gedung Putih seharusnya menawarkan definisi publik yang lebih jelas tentang perilaku menyalahgunakan aturan perdagangan daripada sekadar menghasilkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.** Menteri Perdagangan A.S. Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah akan menyelidiki “sejauh mana defisit bilateral kami dengan negara itu [termasuk Indonesia] adalah hasil dari kecurangan atau perilaku tidak pantas lainnya.”<sup>14</sup> Gedung Putih seharusnya mendefinisikan apa yang dianggapnya sebagai perilaku curang atau tidak pantas dalam hubungan perdagangan bilateral jika pihaknya melanjutkan penyelidikan ini.
- **Amerika Serikat dan Indonesia seharusnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Jakarta yang melibatkan para pemimpin perusahaan multinasional yang berbasis di A.S., Jokowi, dan pejabat tinggi Indonesia lainnya.** KTT semacam itu dapat memberikan peluang bagi Jokowi untuk mendiskusikan investasi baru dalam infrastruktur Indonesia, salah satu prioritas terbesarnya, dengan perusahaan A.S. Perusahaan A.S.—mungkin bekerja sama dengan perusahaan Australia dan Jepang yang memiliki keakraban dengan Indonesia—dapat menjadi penawar yang kompetitif untuk proyek

pembangunan jalan, kereta api, pelabuhan, dan proyek infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan Indonesia.

## *KESIMPULAN*

Hubungan strategis dan ekonomi A.S.-Indonesia yang menghindari ilusi dan berfokus pada tiga sasaran keamanan terpisah—meningkatkan penangkalan di Laut Cina Selatan, memerangi militan yang terkait dengan Negara Islam, dan memerangi pembajakan dan kejahatan transnasional lainnya di Asia Tenggara—akan meningkatkan keamanan regional dan memajukan kepentingan kedua negara.

Pemerintah Indonesia yang mengambil posisi lebih kuat di Laut Cina Selatan dapat mendorong ASEAN untuk mengambil posisi yang lebih terpadu secara keseluruhan pada sengketa Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah gagal mencapai konsensus mengenai strategi terhadap Laut Cina Selatan, tetapi posisi Indonesia yang lebih kuat dapat meyakinkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Filipina, untuk bergabung dengan pendekatan terpadu.<sup>15</sup> Sementara itu, jika Jakarta lebih berkomitmen untuk memerangi Negara Islam dan pembajakan yang semakin memacu pendanaan bagi kelompok militan di Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya menjadi lebih aman tetapi juga membantu mengungkap sel-sel militan di Australia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara-negara mitra A.S. lainnya. Komitmen semacam itu mungkin mewajibkan Indonesia untuk meningkatkan jaringan intelijennya dan membagikan lebih banyak informasi dengan negara-negara di kawasan itu.

Sementara para pemimpin di Washington dan Jakarta membentuk kembali hubungan untuk berfokus pada keamanan, kedua negara seharusnya berupaya untuk memastikan bahwa hubungan ekonomi tidak memburuk. Strategi ekonomi jangka panjang A.S. apa pun terhadap Asia Tenggara perlu mengakui bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di kawasan itu dan pasar terbesar yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan A.S. di Asia Tenggara.

Pada akhirnya, hubungan yang lebih baik dengan Jakarta dapat menjadi aset jika hubungan Washington dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya terancam oleh pergeseran kebijakan imigrasi A.S. Mempertahankan hubungan produktif dengan negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dapat membantu para pejabat A.S. berpendapat bahwa kebijakan imigrasi baru bukanlah penghalang untuk bekerja dengan negara-negara mayoritas Muslim tetapi hanya upaya sempit untuk menghentikan militan memasuki Amerika Serikat.

## CATATAN

---

1. Karlis Salna dan Herdaru Purnomo, "Indonesia Can't Figure Out Why It's on Trump's Trade Hit List," *Bloomberg Politics*, 12 April 2017, <http://bloomberg.com/politics/articles/2017-04-12/indonesia-dazed-confused-by-u-s-trade-probe-before-pence-trip>.
2. Rex Tillerson, "Pidato kepada Pegawai Departemen Luar Negeri A.S." (pidato, Departemen Luar Negeri A.S., Washington, DC, 3 Mei 2017), <http://state.gov/secretary/remarks/2017/05/270620.htm>.
3. Manuel Mogato dan Martin Petty, "Push for South China Sea Code Stirs ASEAN Suspicions About Beijing's Endgame," *Reuters*, 27 April 2017, <http://reuters.com/article/us-southchinasea-asean-analysis-idUSKBN17T0A5>.
4. Sidney Jones, "Battling ISIS in Indonesia," *New York Times*, 18 Januari 2016, <http://nytimes.com/2016/01/19/opinion/battling-isis-in-indonesia.html>.
5. John McBeth, "Inside the Cauldron of Indonesia-ISIS Terror," *Asia Times*, 17 Januari 2017, <http://atimes.com/article/inside-cauldron-indonesian-isis-terror>.
6. Italia memiliki unit semacam itu dan telah menggunakannya secara efektif di banyak negara. Lihat Missy Ryan, "How the Italian Police Wound Up Having a Significant Presence in Iraq," *Washington Post*, 23 Juni 2016, <http://washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/06/23/how-the-italian-police-wound-up-having-a-significant-presence-in-iraq>. Saya berterima kasih kepada Max Boot untuk poin ini.
7. Joseph Chinyong Liow, "ISIS in the Pacific: Assessing Terrorism in Southeast Asia and the Threats to the Homeland" (kesaksian di depan subkomite kontraterorisme dan intelijen DPR, Washington, DC, 27 April 2016), <http://brookings.edu/testimonies/isis-in-the-pacific-assessing-terrorism-in-southeast-asia-and-the-threat-to-the-homeland>.
8. Joshua Kurlantzick, "Democratic Backsliding and the Reach of ISIS in Southeast Asia," *Current History* 115, no. 782 (September 2016): 226–232, <http://cfr.org/content/newsletter/files/Kurlantzick.pdf>.
9. "Joint Navy Patrols Between Indonesia, Philippines, and Malaysia to Cut Off Sulu Sea Corridor to Militants," *Associated Press*, 4 Juni 2017, <http://scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2096834/joint-navy-patrols-between-indonesia-philippines-and-malaysia>.
10. Krithika Varagur, "Hard-Line Islamist Groups Meet Official, Popular Roadblocks in Indonesia," *Voice of America*, 8 Juni 2017, <http://voanews.com/a/hard-line-islamist-groups-indonesia/3891817.html>.
11. Prashanth Parameswaran, "What's With the New US-Philippines Sulu Sea Patrols Under Duterte?," *Diplomat*, 1 Juli 2017, <http://thediplomat.com/2017/07/whats-with-the-new-us-philippines-sulu-sea-patrols-under-duterte>.
12. Salna dan Purnomo, "Indonesia Can't Figure Out Why It's on Trump's Trade Hit List."
13. Simon Roughneen, "Pence Softens Trump's Trade Talk During Indonesia Visit," *Nikkei Asian Review*, 22 April 2017, <http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Pence-softens-Trump-s-trade-talk-during-Indonesia-visit>.
14. Yashwant Raj, "Trump Orders Investigation of Countries With Trade Deficit With US, India on the List," *Hindustan Times*, 3 April 2017, <http://hindustantimes.com/business-news/trump-orders-investigation-of-countries-with-trade-deficit-with-us-india-on-the-list/story-RkZjiCzHXvNmte9FbehT3L.html>.
15. Manuel Mogato, Michael Martina, dan Ben Blanchard, "ASEAN Deadlocked on South China Sea, Cambodia Blocks Statement," *Reuters*, 26 Juli 2016, <http://reuters.com/article/us-southchinasea-ruling-asean-idUSKCN1050F6>.



Council on Foreign Relations (CFR) adalah organisasi keanggotaan independen, nonpartisan, kelompok cendekiawan, dan penerbit yang didedikasikan untuk menjadi narasumber bagi anggotanya, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, jurnalis, pendidik dan pelajar, pemimpin sipil dan agama, dan warga lainnya yang tertarik untuk membantu mereka lebih memahami dunia dan pilihan kebijakan luar negeri yang dihadapi Amerika Serikat dan negara lain. Didirikan pada tahun 1921, CFR menjalankan misinya dengan mempertahankan keanggotaan yang beragam, dengan program khusus untuk mempromosikan minat dan mengembangkan keahlian bagi generasi pemimpin kebijakan luar negeri di masa mendatang; mengadakan pertemuan di kantor pusatnya di New York dan di Washington, DC, dan kota-kota lain tempat pejabat pemerintah senior, anggota Kongres, pemimpin global, dan pemikir terkemuka datang bersama-sama dengan anggota CFR untuk mendiskusikan dan memperdebatkan masalah internasional utama; mendukung Program Studi yang mendorong penelitian independen, memungkinkan para cendekiawan CFR untuk membuat artikel, laporan, dan buku dan mengadakan diskusi yang menganalisis isu-isu kebijakan luar negeri dan membuat rekomendasi kebijakan yang konkret; menerbitkan *Foreign Affairs*, jurnal terkemuka tentang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri A.S.; mensponsori Satuan Tugas Independen yang menghasilkan laporan dengan temuan dan petunjuk kebijakan tentang topik kebijakan luar negeri yang paling penting; dan menyediakan informasi dan analisis terkini tentang peristiwa dunia dan kebijakan luar negeri Amerika di situs webnya, CFR.org.

**Council on Foreign Relations tidak mengambil posisi kelembagaan dalam masalah kebijakan dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah A.S. Semua pandangan yang diungkapkan dalam publikasinya dan di situs webnya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penulis atau para penulis.**

Council Special Reports (CSR) adalah laporan kebijakan ringkas, yang diproduksi untuk memberikan tanggapan cepat terhadap krisis yang sedang berkembang atau berkontribusi pada pemahaman publik tentang dilema kebijakan saat ini. CSR ditulis oleh masing-masing penulis—yang mungkin merupakan mitra CFR atau ahli yang diakui dari luar lembaga—berkonsultasi dengan komite penasihat, dan diharapkan memakan waktu enam puluh hari dari permulaan hingga publikasi. Komite itu berfungsi sebagai tempat berkonsultasi dan memberikan umpan balik pada konsep laporan. Komite itu biasanya bertemu dua kali—satu kali sebelum konsep laporan ditulis dan sekali lagi ketika ada konsep laporan yang ditinjau; akan tetapi, anggota komite penasihat, tidak seperti anggota Satuan Tugas, tidak diminta untuk menandatangani laporan atau sebaliknya mendukungnya. Setelah diterbitkan, CSR diposting di CFR.org.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang CFR atau Laporan Khusus ini, silakan tulis surat ke Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10065, atau hubungi kantor Komunikasi di 212.434.9888. Kunjungi situs web kami, CFR.org.

Hak cipta © 2018 oleh Council on Foreign Relations ® Inc.  
Semua hak dilindungi undang-undang.

Laporan ini tidak boleh direproduksi secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apa pun di luar reproduksi yang diizinkan oleh Pasal 107 dan 108 Undang-Undang Hak Cipta A.S. (17 USC Pasal 107 dan 108) dan kutipan dari pengulas untuk pers publik, tanpa izin tertulis secara tersurat dari Council on Foreign Relations.